BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Penarikan Tarif Retribusi Parkir Wisata Edukasi Kampung Coklat

Akta perjanjian yang dibuat oleh anggota parkir dan pihak Wisata Edukasi Kampung Coklat merupakan perjanjian yang dibuat untuk menyeragamkan tarif parkir Wisata Edukasi Kampung Coklat yang semula anggota parkir semena-sema dalam menentukan tarif. Adapun isi perjanjiannya, adalah:

1. Menjaga kelancaran Arus Lalu Lintas di kawasan Wisata;
2. Menjaga nama baik Wisata Kampung Coklat;
3. Berpakaian rapi dan menjaga kesopanan;
4. Bekerjasama antar petugas parkir;
5. Tarif parkir untuk roda dua: Rp. 2000,-, Mobil: Rp. 5000,-, Mobil Elf: Rp. 10.000,-, dan Bus: Rp. 20.000,-;
6. Jariyah 10% untuk Musholla; dan
7. Bertanggung jawab atas titipan.

Perjanjian tersebut bersifat mengatur (*relative*) maksudnya hukum yang dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan membuat pengaturan tersendiri yang disepakati oleh para pihak tersebut. Contohnya seperti kesepakatan diatas. Hukum bersifat mengatur ini umumnya terdapat dalam lapangan hukum perjanjian/ hukum kontrak (Buku

III KUH Perdata). Jadi, dalam hal ini, jika para pihak mengatur lain, maka aturan yang dibuat oleh para pihaklah yang berlaku. Aturan tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian.

Suatu perjanjian dikatakan sah dan berakibat hukum apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ada dalam hukum perjanjian. Adapun syarat yang dimaksud antara lain:

1. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Yang dimaksud dengan sepakat adalah bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dalam perjanjian ini yang sepakat mengikatkan dirinya untuk memenuhi perjanjian adalah anggota parker terbukti dengan kerelaan mereka menandatangani surat perjanjian.

2. Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian

Anggota parkir sudah memenuhi syarat ini, karena kebanyakan dari mereka sudah dewasa menurut undang-undang di Indonesia, menurut hukum adat, dan menurut hukum Islam. Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUH Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3. Mengenai Suatu Hal Tertentu

Apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Dalam perjanjian ini, hal yang diperjanjikan adalah mengenai operasional parker yang tertuang dalam isi perjanjian.

4. Suatu Sebab yang Halal

Yang dimaksud dengan sebab yang halal dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.

Dalam pelaksanaannya ada salah satu isi perjanjian yang tidak dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian yang ada yaitu pada poin ke-5 yang berisi tarif parkir untuk roda dua: Rp. 2000,-, Mobil: Rp. 5000,-, Mobil Elf: Rp. 10.000,-, dan Bus: Rp. 20.000,-. Dalam praktiknya anggota parkir menarik tarif untuk roda dua: Rp. 3000,-, mobil: Rp. 30.000,-, elf: Rp. 50.000,-, bus: Rp. 70.000,-.

Aturan yang dipakai dalam pelaksanaan perparkiran tidak menganut pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tentang Jasa Umum akan tetapi pemerintah setempat membuat kesepakatan sendiri antara anggota parkir dengan pihak Wisata Edukasi Kampung Coklat. Hal ini dibenarkan

karena dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tentang Jasa Umum tidak adanya larangan membuat kesepakatan sendiri dalam usaha perparkiran.

Seperti yang kita ketahui bahwa lahan yang mereka gunakan untuk tempat parkir merupakan lahan milik pribadi dan hanya sesekali memakai tepi jalan untuk lahan parkir. Jika kita melihat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Jasa Umum Pasal 51 (2) yang berbunyi “Masa retribusi untuk parkir berlangganan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun, merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.” Usaha parkir yang mereka dirikan tidak dikenai biaya retribusi karena mereka tidak menggunakan tepi jalan raya untuk mengembangkan usaha mereka hanya pada saat tertentu saja.

B. Pelaksanaan Perjanjian Penarikan Tarif Retribusi Parkir Wisata Edukasi Kampung Coklat dalm Perspektif Hukum Islam

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya, dan syarat keabsahannya. Perjanjian yang dilakukan antara anggota parkir dengan pihak Wisata Edukasi Kampung Coklat sudah memenuhi rukun dan syarat akad atau perjanjian dalam hukum Islam. Adapun rukun yang dipenuhi dalam akad atau perjanjian ini adalah:

1. Adanya para pihak yang membuat akad (*al-'aqidain*), yaitu anggota parkir dengan pihak Wisata Edukasi Kampung Coklat,
2. Pernyataan kehendak (*shigatul-'aqd*), yaitu:
 - a. Menjaga kelancaran Arus Lalu Lintas di kawasan Wisata,
 - b. Menjaga nama baik Wisata Kampung Coklat,
 - c. Berpakaian rapi dan menjaga kesopanan,
 - d. Bekerjasama antar petugas parkir,
 - e. Tarip parkir untuk roda dua: Rp. 2000,-, Mobil: Rp. 5000,-, Mobil Elf: Rp. 10.000,-, dan Bus: Rp. 20.000,-,
 - f. Jariyah 10% untuk Musholla, dan
 - g. Bertanggung jawab atas titipan.
3. Objek akad (*mahallul-'aqd*), objek dalam perjanjian ini adalah tentang perparkiran, dan
4. Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*), tujuan dari perjanjian ini adalah untuk kepentingan bersama antara anggota parkir, pengunjung wisata, dan pihak Wisata Edukasi Kampung Coklat yang mana agar terwujud operasional parkir yang baik.

Perjanjian tersebut juga sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian atau kontrak secara syariah sebagai berikut:

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya, syarat ini mengandung pengertian setiap orang pada prinsipnya bebas membuat perjanjian tetapi kebebasan itu ada batasannya yaitu tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam baik yang terdapat dalam Alquran

maupun Hadist. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka akan mempunyai konsekuensi yuridis perjanjian yang dibuat batal demi hukum. Kesepakatan yang dibuat antara anggota parkir tidak bertentangan dengan syari'at Islam karena tujuan di buatnya kesepakatan tersebut adalah untuk tercapainya kemaslahatan bersama antara anggota parkir sebagai penyedia jasa, pengunjung sebagai pengguna jasa, dan pihak Wisata Edukasi Kampung Coklat selaku pemberi ijin operasi.

2. Harus sama ridha dan ada pilihan, syarat ini mengandung pengertian perjanjian harus didasari pada kesepakatan para pihak secara bebas dan sukarela, tidak boleh mengandung unsur paksaan, kekhilafan maupun penipuan. Apabila syarat ini tidak terpenuhi dan belum dilakukan tindakan pembatalan maka perjanjian yang dibuat tetap dianggap sah.
3. Harus jelas dan gamblang, sebuah perjanjian harus jelas apa yang menjadi obyeknya, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak batal demi hukum sebagai konsekuensi yuridisnya. Perjanjian yang dilakukan oleh anggota parkir sudah gamblang dan jelas obyeknya.

Selain syarat sahnya akad yang sudah dipaparkan diatas dalam kaitan pelaksanaan perjanjian penarikan tarif retribusi parkir Wisata Edukasi Kampung Coklat. Ada syarat terbentuknya suatu perjanjian. Syarat ini berkaitan erat dengan rukun dalam sebuah perjanjian, syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Tamyiz, dalam hal ini pihak yang melakukan akad harus mempunyai syarat yang satu ini.
2. Kesesuaian antara ijab dan qobul atau kesepakatan, perjanjian yang buat oleh anggota parkir dan pihak kampung coklat sudah disepakati antar keduanya ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan oleh anggota parkir dan diterima oleh pihak Kampung Coklat selaku pemberi ijin usaha parkir.
3. Kesatuan majelis akad, perjanjian tersebut dibuat berdasarkan musyawarah bersama dalam satu majelis di dalam Wisata Edukasi Kampung Coklat.
4. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan, objek dalam perjanjian ini adalah segala sesuatu hal atau klausul perjanjian yang berkaitan dengan pelaksanaan perparkiran yang tertuang dalam surat pernyataan anggota parkir.
5. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seperti yang sudah dijelaskan dalam rukun akad diatas bahwa tujuan dari perjanjian ini adalah untuk kepentingan bersama antara anggota parkir, pengunjung wisata, dan pihak Wisata Edukasi Kampung Coklat yang mana agar terwujud operasional parkir yang baik.

Ada beberapa asas perjanjian Islam yang tidak terpenuhi dalam perjanjian tersebut. Asas-asas perjanjian Islam yang sudah dipenuhi dalam perjanjian tersebut, antara lain:

1. *Al-Hurriyah* (kebebasan), asas ini mengandung pengertian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*). Asas *al-hurriyah* ini dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak. Para pihak dalam perjanjian ini bebas menentukan suatu hal yang akan disepakati. Kesepakatan tersebut diputuskan pada saat musyawarah.
2. *Al-Adalah* (keadilan), perjanjian yang dibuat senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan berimbang dan tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.
3. *Al-Ridha* (kerelaan), segala transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak dan didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh mengandung unsur paksaan, tekanan, dan penipuan. Asas ini dikenal dengan asas konsensualisme dalam hukum Perdata. Dalam perjanjian yang dilakukan oleh anggota parkir, anggota parkir rela menyepakati perjanjian tersebut terbukti dengan penandatanganan kesepakatan yang dibubuhi materai.

Berlakunya asas *al-ridha* memantapkan adanya asas *al-hurriyah* atau kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, tanpa sepakat maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa adalah *contradiction interminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya,

yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana (*take it or leave it*).

4. *Al-Kitabah* (terulis), setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis untuk kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa dan dalam pembuatan perjanjian tersebut hendaknya disertai dengan adanya saksi-saksi serta prinsip tanggung jawab individu. Bentuk tertulis ini dimaksudkan apabila terjadi sengketa di kemudian hari terdapat alat bukti tertulis mengenai sengketa yang terjadi. Perjanjian tersebut sudah memenuhi asas ini terbukti dengan adanya surat pernyataan anggota parkir Wisata Edukasi Kampung Coklat.

Beberapa asas perjanjian Islam yang tidak dipenuhi dalam kesepakatan ini, yaitu:

1. Asas *Al-Musawah* (persamaan atau kesetaraan), asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam perjanjian mempunyai kedudukan yang sama yaitu mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang dalam menentukan *term of condition* dari suatu akad. Asas ini menunjukkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) dan yang membdakan kedudukan seseorang di sisi Allah adalah derajat ketakwaannya. Perjanjian tersebut tidak memenuhi asas ini dikarenakan ada salah satu pihak yang bertindak sebagai otoritas, karena pada kenyataannya perjanjian tersebut hanya

diperuntukkan untuk anggota parkir saja. Jadi, tidak ada sanksi untuk pihak Kampung Coklat, sanksi hanya diperuntukkan bagi anggota parkir.

2. *Ash-Shidq* (kebenaran dan kejujuran), setiap muslim wajib untuk berkata benar dan jujur terutama dalam hal melakukan perjanjian dengan pihak lain, sehingga kepercayaan menjadi sesuatu yang esensial demi terlaksananya suatu perjanjian atau akad. Dalam pelaksanaannya, anggota parkir tidak terbuka kepada pengguna jasa parkir mengenai tarif yang sudah ditetapkan dalam surat pernyataan.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam kajian pustaka, perjanjian merupakan perikatan hukum yang memiliki akibat hukum. Akibat hukum dari perjanjian yang sah adalah berlakunya perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang dimaksud dengan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, adalah bahwa kesepakatan yang dicapai oleh para pihak dalam perjanjian mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya suatu undang-undang. Para pihak dalam perjanjian tidak boleh keluar dari perjanjian secara sepihak, kecuali apabila telah disepakati oleh para pihak atau apabila berdasarkan pada alasan- alasan yang diatur oleh undang- undang atau hal- hal yang disepakati dalam perjanjian.

Para pihak yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah anggota parkir yang menyepakati surat pernyataan yang berisi suatu hal tertentu seperti yang sudah disebutkan. Dengan disahkannya pernyataan tersebut. Secara tidak langsung berakibat hukum bagi anggota parkir, yang mana anggota parkir wajib melaksanakan perjanjian tersebut. Apabila anggota parkir melanggar

perjanjian tersebut maka sanksi yang dikenakan kepada anggota parkir adalah diberhentikan dari ijin operasi usaha parkir atau dicabut perijinannya.

Perjanjian yang dilakukan oleh anggota parkir merupakan suatu peristiwa dimana anggota parkir berjanji kepada pihak Kampung Coklat, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Apabila seseorang tersebut sudah berjanji maka wajib baginya untuk memenuhi perjanjian tersebut. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Aqad (perjanjian) mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Bisa dikatakan bahwa perjanjian itu tidak hanya perjanjian yang dilakukan dengan seorang yang lain melainkan juga berjanji kepada Allah karena setiap perbuatan yang kita lakukan tidak terlepas dari hukum Allah. Perjanjian terbagi kedalam tiga jenis, yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang;
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi dengan para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukannya. Ada tindakan hukum yang hanya memerlukan tingkat kecakapan bertindak hukum minimal, yaitu tamyiz, dimana apabila ini dipenuhi tindakan hukum itu sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Ada pula tindakan hukum yang memerlukan kecakapan bertindak hukum sempurna, yaitu kedewasaan, dimana apabila ini telah dipenuhi tindakan hukum itu sudah sah dan akibat hukumnya dapat dilaksanakan, tetapi apabila tidak dipenuhi tindakan hukum itu tetap sah, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan dan tergantung ratifikasi (ijazah) wali. Ada pula tindakan hukum yang memerlukan kecakapan bertindak hukum maksimal dimana apabila tidak dipenuhi tindakan hukum itu tidak sah.

Dalam pelaksanaan penarikan tarif retribusi parkir Wisata Edukasi Kampung Coklat ini dapat dikategorikan ke dalam jenis yang kedua, yaitu perjanjian untuk berbuat sesuatu. Yang mana dalam perjanjian ini akibat hukum bagi anggota parkir adalah melaksanakan kesepakatan yang dibuat dalam operasional parkir yang didirikannya.

Anggota parkir tidak melaksanakan seluruh kesepakatan yang ada dalam akta perjanjian yang dibuat. Perjanjian yang dilanggar dalam akta perjanjian pada poin ke-5 yang berbunyi: tarif parkir untuk roda dua: Rp. 2000,-, Mobil: Rp. 5000,-, Mobil Elf: Rp. 10.000,-, dan Bus: Rp. 20.000,-. Dalam praktiknya anggota parkir menarik tarif untuk roda dua: Rp. 3000,-, mobil: Rp. 30.000,-, elf: Rp. 50.000,-, bus: Rp. 70.000,-.

Hal ini bertentangan dengan asas dalam perjanjian Islam yaitu *Ash-Shidq* (kebenaran dan kejujuran), setiap muslim wajib untuk berkata benar dan jujur terutama dalam hal melakukan perjanjian dengan pihak lain, sehingga kepercayaan menjadi sesuatu yang esensial demi terlaksananya suatu perjanjian atau akad. Dalam pelaksanaannya, anggota parkir tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang tertuang dalam perjanjian. Anggota parkir juga tidak amanah dengan perjanjian yang mereka sepakati.

Dikarenakan anggota parkir tidak menggunakan fasilitas umum untuk menjalankan perparkirannya maka anggota parkir tidak dikenai biaya retribusi. Aturan yang dipakai dalam pelaksanaan perparkiran tidak menganut pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tentang Jasa Umum akan tetapi pemerintah setempat membuat kesepakatan sendiri antara anggota parkir dengan pihak Wisata Edukasi Kampung Coklat.

Hal ini dibenarkan karena dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tentang Jasa Umum tidak adanya larangan membuat kesepakatan sendiri dalam usaha perparkiran. Perjanjian tersebut juga tidak menyalahi hukum Islam karena didalam perjanjian Islam terdapat asas *Al-hurriyah* yaitu asas kebebasan berkontrak.

Seperti yang kita ketahui bahwa lahan yang mereka gunakan untuk tempat parkir merupakan lahan milik pribadi dan hanya sesekali memakai tepi jalan untuk lahan parkir. Jika kita melihat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Jasa Umum Pasal 51 (2)

yang berbunyi “Masa retribusi untuk parkir berlangganan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun, merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.” Usaha parkir yang mereka dirikan tidak dikenai biaya retribusi karena mereka tidak menggunakan tepi jalan raya untuk mengembangkan usaha mereka hanya pada saat tertentu saja.

Dari pernyataan yang diutarakan oleh anggota parkir bahwa retribusi yang dibebankan kepada tukang parkir adalah biaya retribusi atau pajak Negara atas usaha yang mereka dirikan bukan lagi pajak daerah karena tidak masuk ketentuan yang sudah diundangkan dalam Peraturan Daerah.

Kalaupun dikenai pajak, bukanlah pajak atau retribusi yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar akan tetapi pajak penghasilan yang disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pajak ini dibenarkan oleh Islam. Dalam Hukum Islam, prinsip yang dianut dalam pemungutan pajak adalah:

1. Harus ada Nash yang Memerintahkannya

Setiap pendapatan dalam Negara Islam harus diperoleh sesuai dengan hukum syara' dan juga harus disalurkan sesuai hukum-hukum syara'. Prinsip kebijakan penerimaan Negara yang pertama adalah harus adanya nash (Al-Qur'an dan Hadist).

2. Harus ada Pemisah Muslim dan Non-Muslim

Islam membedakan antara Subjek Zakat dan Pajak Muslim dengan non-Muslim. Zakat misalnya, hanya bersumber dari kaum Muslim, dan hanya digunakan untuk kepentingan kaum Muslim, kepada non-Muslim dipungut jizyah. Bagi kaum Muslim, pembayaran zakat dan pajak akan bernilai ibadah, sebaliknya bagi non-Muslim, ia bernilai kehinaan, karena kekafiran mereka.

3. Hanya Golongan Kaya yang Menanggung Beban

Prinsip kebijakan pemasukan terpenting ketiga adalah bahwa system zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihan yang memikul beban utama. Orang kaya adalah orang yang mempunyai kekayaan melebihi dari kebutuhan, bukan melebihi keinginannya, apalagi melebihi syahwatnya. Yang menjadi prinsip penting disini adalah bahwa sumber penerimaan hanya dipungut dari orang kaya saja, sekalipun dari non-Muslim.

4. Adanya Tuntutan Kemaslahatan Umum

Prinsip kebijakan penerimaan Negara keempat adalah adanya tuntutan kemaslahatan umum, yang mesti didahulukan untuk mencegah kemudharatan. Dalam keadaan tertentu (darurat), Ulil Amri wajib mengadakan kebutuhan rakyat, disaat ada atau tidaknya harta. Tanpa dipenuhinya kebutuhan tersebut, besar kemungkinan akan datang kemudharatan yang lebih besar lagi. Atas dasar tuntutan umum inilah, Negara boleh mengadakan suatu jenis pendapatan tambahan.

Para anggota parkir membayar pajak dengan pungutan yang mereka ambil atau dari penghasilan mereka menjadi tukang parkir. Akan tetapi pembayaran pajak yang dilakukan oleh tukang parkir bukan merupakan pajang penghasilan atas usaha yang mereka jalankan melainkan pajak atas kepemilikan tanah yang mereka miliki.